BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2015 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari Eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai salah satu unit kerja dalam Kementerian Perhubungan berperan mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perhubungan, pemberian masukan berkaitan dengan penetapan kebijakan perhubungan melalui hasil-hasil penelitian. Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berupaya memberdayakan potensi penelitian dan pengembangan untuk dapat mencapai peningkatan kinerja pelaksaanan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, program utama Badan Litbang Perhubungan adalah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Transportasi. Pada restrukturisasi program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan kegiatan per-unit kerja yang dibagi dalam 2 kelompok kegiatan besar, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi, dan Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Manajemen Lainnya.

Disamping itu dalam upaya memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pengembangan tenaga fungsional (peneliti, litkayasa, arsiparis, dll) dan kesempatan mengikuti pendidikan formal, kursus serta seminar baik di dalam maupun luar negeri. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM tersebut, telah pula dilakukan serangkaian kegiatan penunjang antara lain temu karya peneliti, ceramah ilmiah, diskusi ilmiah, lokakarya (*workshop*), dengan mengundang para pakar baik dari perguruan tinggi maupun instansi lain guna memperluas wawasan peneliti.

Dalam upaya pemanfaatan hasil penelitian dan mendukung jaringan kerjasama serta sebagai media informasi, telah diterbitkan media informasi berupa warta penelitian dan jurnal secara berkala. Penerbitan tersebut antara lain untuk mempublikasikan karya tulis peneliti, dan sebagai wadah pembinaan karya tulis ilmiah.

1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari:

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DARAT DAN PERKERETAAPIAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

LAUT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

UDARA

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi sekretariat badan dan pusat litbang adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Fungsi : a. Penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara;

1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan dokumentasi, kepustakaan dan publikasi serta pelayanan administrasi kerjasama;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan dan kerumahtanggaan.
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidangnya.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidangnya;

1. Penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di bidangnya;
2. Penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan di bidangnya;
3. Penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidangnya;
4. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
5. Penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
6. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
7. Penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan di bidangnya; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di bidangnya.

Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi Tinjau Ulang Renstra Badan Litbang Perhubungan yang telah disesuaikan dengan RPJPN, RPJMN 2015-2019 menjadi acuan bagi Badan Litbang Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penelitian dan pengembangan di sektor transportasi. Secara detail tujuan dan sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut :

**Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
2. Meningkatkan kapasitas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi.
3. Meningkatnya kapasitas penyebaran hasil penelitian dan pengembangan.

**Sasaran**

Sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015–2019 meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan.
2. Peningkatan akses ke sumber informasi ilmu, pengetahuan dan teknologi transportasi.
3. Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan.

Pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran secara berturut sebagai berikut:

1. Prosentase penelitian yang dijadikan bahan masukan/rekomendasi kebijakan.
2. Prosentase penelitian naskah akademis/kebijakan (NSPK) yang diajukan kepada Kemenhub.
3. Prosentase rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi.
4. Jumlah aplikasi, model, design/prototype.
5. Jumlah penelitian per peneliti.
6. Jumlah penelitian yang dikerjasamakan.
7. Jumlah penelitian yang dipublikasikan.
8. Jumlah penelitian yang mendapat HKI.
9. Jumlah database penelitian.
10. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan posisi sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 245 orang pegawai, disajikan sebagaimana tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unit Kerja** | **Tahun** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Setbadan Litbang | 83 | 83 | 81 | 82 | 83 |
| 2. | Puslitbang MTM | 35 | 33 | 29 | 29 | 33 |
| 3. | Puslitbang Phb. Darat dan Perkeretaapian | 65 | 62 | 59 | 58 | 54 |
| 4. | Puslitbang Phb. Laut | 41 | 38 | 35 | 34 | 33 |
| 5. | Puslitbang Phb. Udara | 51 | 50 | 42 | 43 | 43 |
|  | **Jumlah** | **275** | **266** | **246** | **246** | **246** |

Tabel 1.2

Komposisi Jabatan Fungsional Peneliti Menurut Jenjang Peneliti

| **No** | **Jabatan** | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Peneliti Pertama | 41 | 35 | 45 | 54 | 55 |
| 2. | Peneliti Muda | 28 | 26 | 24 | 30 | 31 |
| 3. | Peneliti Madya | 41 | 46 | 47 | 44 | 41 |
| 4. | Peneliti Utama | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|  | **Jumlah** | **115** | **111** | **119** | **131** | **128** |

1. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian isu-isu strategis bidang transportasi dan dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan transportasi, kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi yang berkembang dan permasalahan di lapangan. Isu strategis penelitian sektor transportasi terbagi ke dalam enam bidang moda, yaitu Transportasi Manajemen Multimoda, Transportasi Darat (Jalan), Perkeretaapian, dan ASDP (Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Transportasi Laut dan Transportasi Udara.

* + - 1. **Transportasi Manajemen Multimoda**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Sedangkan transportasi intermoda atau antarmoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan dengan tetap menggunakan unit kemasan yang sama.

Menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem ataupun mekanisme pergerakan dan perpindahan barang dari satu moda ke moda lainnya secara lancar, cepat, akurat dan dengan biaya yang wajar. Moda yang akan terlibat meliputi angkutan darat (truk, *trailer* dan truk mini), angkutan kereta api (gerbong dan apron/emplasemen), angkutan sungai dan danau (kapal, dermaga, *scaner* dan alat bongkar/muat), angkutan laut (dermaga, alat bongkar/muat, area penumpukan sementara dan alat perpindahan antarmoda) dan angkutan udara (pesawat, apron, alat bongkar/muat, area penumpukan sementara dan alat perpindahan antarmoda).

Penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda bertujuan mewujudkan pelayanan *one stop service* angkutan penumpang dan barang dengan *single ticket* untuk angkutan penumpang dan *single seamless services* (S3), yaitu *single operator, single tariff* dan *single document* untuk angkutan barang. Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh keterpaduan jaringan pelayanan, keterpaduan layanan dan jaringan prasarana. Beberapa isu strategis penelitian bidang transportasi manajemen multimoda yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan pelayanan transportasi;
2. Keterpaduan prasarana transportasi;
3. SDM transportasi multimoda;
4. Regulasi multimoda;
5. Data base bidang multimoda;
6. Kewenangan dan pembinaan BUAM;
7. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus secara regional;
8. Kebijakan Sislognas;
9. Integrasi sistem logistik ASEAN dan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport);
10. Sustainable transport;
11. NSPK transportasi multimoda.
    * + 1. **Transportasi Darat (Jalan)**

Transportasi darat (jalan) merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pembangunan nasional. Transportasi darat diantaranya terdiri dari jalan dan angkutan jalan raya, serta angkutan dalam kota. Alat angkut darat ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dengan sarana angkutan danau dan sungai, laut serta udara, sehingga dalam pengembangannya perlu perencanaan yang terintegrasi. Jaringan jalan memberikan pengaruh besar terhadap keterkaitan antar pusat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Beberapa isu strategis penelitian bidang transportasi darat yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan perencanaan transportasi, meliputi manajemen lalu lintas, pengembangan jaringan dan masterplan;
2. Kemacetan Lalu Lintas, meliputi kecepatan rata-rata yang rendah di kota besar, implikasi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat sementara perkembangan panjang jalan rendah dan kurangnya disiplinnya para pengguna jalan;
3. Keselamatan Transportasi Jalan, terindikasi dari tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya, fatalitas korban kecelakaan, tingginya pelanggaran lalu lintas;
4. Pelayanan Angkutan Umum meliputi peran angkutan umum yang kian berkurang karena tidak ada perbaikan, pengembangan angkutan massal, integrasi pelayanan angkutan umum masih kurang, teknologi sarana dan prasarana masih tertinggal;
5. Angkutan Barang, meliputi penanganan muatan lebih (overload) pada angkutan barang, beban kerusakan jalan akibat overload, optimalisasi fungsi jembatan timbang, dan penyusunan kriteria fasilitas jembatan timbang;
6. Penggunaan Energi untuk Transportasi meliputi pemanfaatan energi terbarukan, konversi BBM ke CNG;
7. Perencanaan transportasi jalan meliputi perencanaan jaringan jalan, penyusunan masterplan, pengembangan jaringan;
8. Lingkungan (polusi udara) meliputi penghitungan emisi gas buang serta pencapaian target nasional;
9. Peningkatan fungsi dan fasilitas Pejalan kaki;
10. Peningkatan ketersediaan fasilitas untuk wanita, ibu menyusui, anak dan lansia serta peningkatan peran sumber daya wanita perhubungan;
11. Penyediaan dan peningkatan fasilitas untuk Penyandang cacat;
12. NSPK Bidang Transportasi Darat seperti pedoman untuk transportasi jalan;
13. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Transportasi ITS;
14. Kebutuhan SDM Transportasi bidang transportasi darat;
15. Pemenuhan database transportasi, meliputi data kecelakaan, data sarana dan prasarana jalan, data kinerja transportasi, dsb.
    * + 1. **Transportasi ASDP (Air Sungai Danau dan Penumpang)**

KM No 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Penyeberangan memuat berisi kebijakan dan program sampai dengan tahun 2029 untuk merehabilitasi dan meningkatkan tingkat pelayanan dari fasilitas infrastruktur dan armada penyeberangan, kapasitas lintas penyeberangan, integrasi dengan moda lain berupa akses jalan dan keretaapi, serta membangun fasilitas yang baru untuk mendukung konektivitas nasional. Cetak Biru ini menganut konsep Sabuk (Selatan, Tengah, dan Utara) dari transportasi penyeberangan yang berusaha menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Indonesia melalui jaringan lintas penyeberangan yang terintegrasi. Secara lebih jelas konsep sabuk penyeberangan yang dimaksud dalam KM No 6 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar Konsep Sabuk Transportasi Penyeberangan

Sumber: KM No 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Penyeberangan

(1) **Sabuk Utara** merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Sabang- Ulee Lheue, Mengkapan-TB. Karimun-Telaga Pungkur-Tanjung Uban-Tambelan-Sintete, Ancam-Tarakan-Tolitoli-Amurang, Bitung-Ternate-Rum- Soasiu-Sofifi-Patani-Gebe-Sorong, dan Manokwari-Numfor-Mokmer-Kabuena-Sarmi-Jayapura; (2) **Sabuk Tengah** yang merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Sadai-Tanjung Ru, Manggar-Ketapang, Batulicin-Garongkong, Kariangau-Taipa, Luwuk-Salakan-Banggai-Taliabu-Sanana-Namlea-Hunimua-Waipirit- Wahai-Fakfak; dan (3) **Sabuk Selatan** yang merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Sabang–Ulee Lheu, Bakauheni-Merak, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar,Kayangan-Pototano, Sape- Labuhan Bajo, Larantuka-Waiwerang-Lewoleba-Baranusa-Kalabahi-Ilwaki-Kisar-Letti-Moa-Lakor-Tepa-Saumlaki-Larat-Tual-Dobo-Pomako-Merauke.

Beberapa isu strategis penelitian bidang transportasi ASDP yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Optimalisasi kebutuhan angkutan ASDP dan pelayanan perintis;
      2. Peningkatan kapasitas lintas penyeberangan;
      3. Peningkatan kapasitas pelayanan;
      4. Evaluasi ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dermaga ASDP;
      5. Peningkatan fasilitas angkutan penyeberangan untuk angkutan logistik lintas Pulau Jawa-Bali;
      6. Optimalisasi pengangkutan barang melalui sungai untuk mengurangi kelebihan muatan di jalan;
      7. Teknologi kapal penyeberangan dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan armada;
      8. Teknologi kapal sungai dan danau dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan armada;
      9. Integrasi dan konektivitas transportasi ASDP dengan transportasi jalan dan kereta api;
      10. Manajemen keselamatan angkutan sungai di Pulau Kalimantan;
      11. Desain dan prototipe kapal sungai dan danau di pedalaman;
      12. Desain dan prototipe kapal penyeberangan multifungsi.
      13. **Perkeretaapian**

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkuan secara massal dan keungulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, sehingga perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan prasarananya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang,mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU RI No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian).

Berdasarkan konsep Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019, sampai dengan saat ini peran moda kereta api dalam sistem angkutan penumpang maupun barang dan penumpang secara nasional masih sangat minim, masing-masing baru sekitar 3,18% untuk angkutan penumpang (sebagian besar disokong oleh KA commuter Jakarta) dan 0,16% untuk angkutan barang (sebagian besar disokong oleh KA batubara Sumatera Selatan). Sedangkan dalam RIPNas telah ditetapkan bahwa target pangsa angkutan kereta api di tahun 2030 sebesar 11-13% untuk angkutan penumpang dan 15-17% untuk angkutan barang. Artinya tahun 2019 diperkirakan target untuk angkutan penumpang sekitar 7,5% dan 5% untuk angkutan barang. Sedangkan layanan KA commuter saat ini baru disediakan di 5 kota (Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya dan Solo - Jogya).

Terdapat beberapa isu strategis penelitian bidang perkeretaapian yang perlu mendapat prioritas antara lain:

1. Optimalisasi Kebijakan Moda Shifting Perkeretaapian;
2. Teknologi Perkeretaapian Ramah Lingkungan;
3. Keselamatan Perlintasan Sebidang;
4. Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Kereta Api;
5. Peningkatan kapasitas pelayanan angkutan perkeretaapian;
6. Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
7. Sumberdaya Manusia di bidang Perkeretaapian;
8. NSPK Bidang Perkeretaapian;
9. Restrukturisasi Kelembagaan dan Regulasi Perkeretaapian.
   * + 1. **Transportasi Laut**

Indonesia memiliki kawasan yang strategis dalam dunia pelayaran karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Maka dari itu jasa transportasi laut menjadi potensi yang sangat besar dengan konektivitas antar pulau maupun antar negara. RIPN (Rencana Induk Pelabuhan Nasional) telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 414 Tahun 2013. RIPN dikembangkan atas dasar kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional yang skalanya sangat besar. Indonesia saat ini memiliki 111 pelabuhan komersial yang diusahakan dan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia, 1481 pelabuhan non-komersial, dan 800 dermaga khusus.

Untuk meningkatkan potensi tersebut dibutuhkan strategi percepatan dalam konektivitas antar pulau, terlebih lagi pulau terluar. Selain itu juga di butuhkan sasaran yang jelas yaitu di bangunnya sebagian besar kapal di Indonesia, pelayaran harus memiliki peranan penting dalam standar logistik nasional, sistem manajemen pelabuhan standar internasional, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu peningkatan SDM di bidang pelayaran. Jika kita menitik beratkan pada konektivitas antar pulau maka tidak lepas dari pelayaran perintis. Pelayaran perintis merupakan moda transportasi yang menghubungkan pulau-pulau terluar dan terkecil. Kapal perintis akan menopang rute angkutan lama dan penambahan rute baru guna mewujudkan konektivitas Nasional.

Beberapa isu strategis penelitian bidang transportasi laut yang dihimpun dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut:

* 1. Angkutan Laut

1. Pemenuhan kebutuhan angkutan laut di wilayah terpencil Wilayah NTT, Kepri, Sulut, Papua, Aceh dan Sumbar.
2. Peningkatan jumlah SDM pelaut untuk armada nasional.
3. Optimalisasi pelayanan angkutan laut perintis yang disebabkan oleh tumpang tindih antara trayek perintis dengan trayek komersil, lama round voyage di atas 14 hari, dan load factor masih rendah.
4. Pangsa muatan armada nasional untuk angkutan laut luar negeri masih rendah.
5. Kebutuhan pengoperasian yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis muatan.
6. Pengembangan short sea shipping.
7. Optimalisasi pemberdayaan dan peremajaan armada pelayaran rakyat.
   1. Kepelabuhanan
   2. Ketidaksesuaian pembangunan pelabuhan di daerah dengan RIPN.
   3. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan di pelabuhan.
   4. Penyusunan master plan pelabuhan.
   5. Optimalisasi pelayanan kepelabuhanan (kapasitas belum terpenuhi, TRT tinggi, dwelling time tinggi, congestion, inaportnet belum optimal.
   6. Optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM kepelabuhanan (belum adanya sertfikasi, kurangnya marine inspector).
   7. Optimalisasi peran swasta dalam pengusahaan di pelabuhan (kurangnya dana pengembangan pelabuhan, berperan sebagai operator.
   8. Masih rendahnya aksesibilitas menuju pelabuhan.
   9. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
   10. Kurangnya sarana dan prasarana kenavigasian.
   11. Rendahnya pengawasan terhadap kelaiklautan kapal (pemberian SPB, sertifikasi kapal, uji petik, manajemen keselamatan pelayaran.
   12. Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan laut (pemetaan alur pelayaran di laut dan sungai).
   13. Optimalisasi pengawasan terhadap pemeliharaan dan pembelian/pengadaan kapal baru.
   14. Kompetensi SDM keselamatan pelayaran (belum adanya sertfikasi, kurangnya marine inspector).
   15. Optimalisasi implementasi ISPS Code.
   16. Pembentukan kelembagaan sea and coast guard.
   17. Optimalisasi penerapan NCV.
   18. Isu tentang pengangkutan barang berbahaya.
   19. Perlindungan Lingkungan Maritim
   20. Tingginya pencemaran di pelabuhan dan laut (emisi gas buang dari kapal, reception facilities, limbah dari daerah sekitar pelabuhan).
   21. Masih rendahnya implementasi MARPOL.
       * 1. **Transportasi Udara**

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis tentang kebandarudaraan nasional, Tatanan Kebandarudaraan Nasional (TKN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 69/2012 dan juga Rencana Induk Bandar Udara (RINBU), saat ini tercatat jumlah bandara umum di Indonesia sebanyak 237 bandara, yaitu terdiri dari 26 bandara komersial (dikelola oleh Angkasa Pura I dan II) dan 211 bandara non komersial. Direncanakan hingga tahun 2030 akan dibangun 62 bandara baru sehingga total seluruhnya adalah 299 bandara. Konektivitas dan aksesibilitas transportasi udara direfleksikan dalam banyaknya rute penerbangan dalam dan luar negeri serta penerbangan perintis ke daerah-daerah terpencil. Terdapat beberapa isu strategis penelitian bidang transportasi udara yang dihimpun dalam 5 kelompok , yaitu:

1. Pesawat Udara
   1. Pengembangan industri pesawat udara nasional.
   2. Peremajaan pesawat tua dan mendukung penambahan kapasitas.
   3. Perancangan pesawat udara untuk kebutuhan penerbangan nasional.
   4. Penguatan dan pemanfaatan industri penerbangan nasional.
2. Angkutan Udara
   1. Penambahan kepemilikan pesawat udara oleh maskapai penerbangan.
   2. Pengaturan Slot Time khususnya untuk jadwal *Prime Time*.
   3. Implementasi angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan angkut (*Open Sky*).
   4. Pelayanan penerbangan perintis khususnya di wilayah Indonesia timur.
   5. Dukungan terhadap logistik nasional dalam kerangka SISLOGNAS.
   6. Revitalisasi rute angkutan udara dan ruang udara.
3. Bandar Udara
   1. Kapasitas bandar udara terhadap pertumbuhan transportasi udara.
   2. Rekayasa teknologi fasilitas pelayanan di bandar udara.
   3. Peran serta swasta dan pelaksanaan KPS dalam pembangunan bandar udara.
   4. Pengembangan bandar udara dengan konsep *Aerotropolis*.
   5. Pembebasan lahan untuk pembangunan dan atau pengembangan bandar udara.
4. Navigasi Penerbangan
   1. Perkuatan implementasi Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (LPNPI).
   2. Percepatan modernisasi/ penggantian peralatan navigasi JAATS dan MAATS.
   3. Penerapan penggunaan fasilitas navigasi penerbangan berbasis satelit (GNSS).
   4. Percepatan penyusunan RPM Tatanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
5. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan
   1. Pengawasan pengoperasian pesawat udara.
   2. Penguatan peran dan fungsi otoritas bandar udara.
   3. Penguatan peran dan fungsi Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/ Inspector.
   4. Peningkatan kuantitas dan kualitas personel dan peralatan Aviation Security dan PKP-PK Keamanan Penerbangan.
   5. Penanganan keadaan darurat keamanan penerbangan.
   6. Pemenuhan standar keselamatan penerbangan pada bandar udara kecil.
6. Sistematika Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued).*

BAB II : Perencanaan Kinerja

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerjauntuk setiap pernyataan kinerja.

1. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

1. **RENCANA KINERJA**

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators)* yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan perhubungan atau sejalan dengan tujuan dan sasaran perhubungan tahun 2015–2019, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Selanjutnya akumulasi hasil pembangunan selama lima tahun ke depan akan mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sebagai bagian dari visi dan misi Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan sasaran penelitian dan pengembangan, maka kegiatan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengembangan bidang perhubungan sesuai : kebijakan Sistranas, NSPK, MP3EI, Sislognas dan Masterplan Infrastruktur Perhubungan
2. Perwujudan Sistranas pada jaringan prasarana dan jaringan pelayanan pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah Provinsi (Tatrawil), dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
3. Implementasi Roadmap Balitbang Perhubungan dalam rangka penguatan organisasi Litbang Perhubungan antara lain : pembangunan balai penelitian bidang perhubungan, pembuatan *prototype* teknologi bidang perhubungan, pengadaan perangkat lunak dan peralatan penelitian dan pengembangan data *centre*
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga fungsional kelitbangan melalui kursus – kursus dan kerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan internasional
5. Peningkatan sistem dan jaringan data dan informasi berupa : penerbitan publikasi litbang perhubungan, lomba karya penelitian transportasi, seminar nasional dan internasional dan pengembangan *e-library.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | |
| **JUMLAH** | **SATUAN** |
| 1. | Peningkatan Kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan | a. | Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan | 70 | % |
| b. | Penelitian NSPK yang diajukan kepada kemenhub | 80 | % |
| c. | Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | 75 | % |
| d. | Jumlah aplikasi, model, design/ prototype | 7 | Laporan |
| e. | Jumlah Penelitian per peneliti | 2 | Laporan |
| 2. | Peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK Transportasi | f. | Penelitian yang dikerjasamakan | 7 | Laporan |
| g. | Penelitian yang dipublikasikan | 120 | Jumlah |
| h. | Penelitian yang mendapat HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) | 16 | Jumlah |
| 3. | Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan | i. | Database Penelitian Transportasi | 10 | Jumlah |

Secara rinci untuk tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan memiliki rencana kinerja sebagai berikut :

1. **PERJANJIAN KINERJA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai salah satu unit kerja dalam Kementerian Perhubungan berperan mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perhubungan melalui pemberian masukan berkaitan dengan penetapan kebijakan perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berupaya memberdayakan potensi penelitian dan pengembangan untuk dapat mencapai peningkatan kinerja pelaksaanan tugas dan fungsi.

Kegiatan Litbang diupayakan untuk mengembangkan program penelitian dengan mengacu kepada tujuh pilar kebijakan Sistranas yaitu pelayanan transportasi, keselamatan dan keamanan transportasi, pembinaan pengusahaan transportasi, kualitas sumber daya manusia, dan iptek, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan penghematan energi, penyediaan dana pembangunan transportasi serta kualitas administrasi negara.

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan tahun 2015 - 2019, program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | |
| **JUMLAH** | **SATUAN** |
| 1. | Peningkatan Kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan | a. | Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan | 70 | % |
| b. | Penelitian NSPK yang diajukan kepada kemenhub | 80 | % |
| c. | Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | 75 | % |
| d. | Jumlah aplikasi, model, design/ prototype | 7 | Laporan |
| e. | Jumlah Penelitian per peneliti | 2 | Laporan |
| 2. | Peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK Transportasi | f. | Penelitian yang dikerjasamakan | 7 | Laporan |
| g. | Penelitian yang dipublikasikan | 120 | Jumlah |
| h. | Penelitian yang mendapat HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) | 16 | Jumlah |
| 3. | Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan | i. | Database Penelitian Transportasi | 10 | Jumlah |

Untuk merealisasikan program kegiatan tersebut, pada tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp. 228.259.100.000,- dengan rincian per unit kerja eselon II sebagai berikut :

| **No.** | **Unit Kerja** | **Penelitian** | **Dukungan Manajemen** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat Badan Litbang | 2.561.375 | 73.786.155 | 76.347.530 |
| 2. | Puslitbang MTM | 16.189.772 | 18.578.614 | 34.768.386 |
| 3. | Puslitbang Phb. Darat dan Perkeretaapian | 21.168.020 | 24.998.107 | 46.166.127 |
| 4. | Puslitbang Phb.Laut | 20.115.501 | 12.141.899 | 32.257.400 |
| 5. | Puslitbang Phb. Udara | 13.398.250 | 25.321.407 | 38.719.657 |
|  | **Jumlah** | **73.432.918** | **154.826.182** | **228.259.100** |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

Laporan akuntabilitas kinerja sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan.

1. **Capaian Kinerja**
2. **Perbandingan Target dan Realisasi KinerjaTahun 2015**

Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan, pada tahun 2015 telah menyampaikan hasil penelitian sebanyak 70.95% penelitian sebagai bahan rekomendasi kebijakan, 100% hasil studi yang terkait dengan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), dan 175,47% hasil studi merupakan rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi.

Selain itu pada tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan telah menghasilkan 7 studi merupakan aplikasi/model/design/prototype. Pada tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan juga melaksanakan 7 kegiatan studi yang dikerjakan melalui mekanisme kerjasama dengan institusi-institusi terkait. Para peneliti Badan Litbang pada tahun 2015 telah menghasilkan rata-rata sebanyak 1,65 penelitian, publikasi hasil penelitian sebanyak 120 makalah. Pada tahun 2015 juga terdapat 16 hasil penelitian yang telah mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM, serta telah pula menghimpun 9 jenis data untuk mendukung database penelitian transportasi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET PK** | | **REALISASI KINERJA 2015** | | | | | **KINERJA (%)** |
| **SATUAN** | **JML** | **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **TOTAL** |
| 1. | Peningkatan Kualitas hasil penelitian dan pengembangan | a. | Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan | % | 70 | 4.73 | 15.61 | 34.05 | 70.95 | 70.95 | 101.35 |
| b. | Penelitian NSPK yang diajukan kepada kemenhub | % | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 125 |
| c. | Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | % | 75 | 0 | 0 | 45 | 175 | 175,47 | 232.5 |
| d. | Jumlah aplikasi, model, design/ prototype | Laporan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 |
| e. | Jumlah Penelitian per peneliti | Laporan | 2 | 0.14 | 1 | 1.3 | 1.65 | 1.65 | 82.5 |
| 2. | Peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK Transportasi | f. | Penelitian yang dikerjasamakan | Laporan | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 |
|  |  | g. | Penelitian yang dipublikasikan | Laporan | 120 | 21 | 48 | 69 | 120 | 120 | 100 |
| 3. | Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan | h. | Penelitian yang mendapat HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) | Laporan | 16 | 0 | 6 | 16 | 16 | 16 | 100 |
| i. | Database Penelitian Transportasi | Data | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 90 |

**Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi KinerjaTahun 2011– 2015**

Pada tahun 2010 dan 2011 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang Perhubungan masih menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pada peraturan tersebut IKU belum terdapat IKU Badan Litbang Perhubungan mengenai jumlah kajian/peneliti. Sedangkan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 pengukuran kinerja sudah menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan 68 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2015 agak sedikit berbeda dengan capaian kinerja pada tahun 2014, disebabkan adanya perbedaan pada komponen indikator kinerja utama. Secara umum indikator kinerja Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2015 dapat terpenuhi, walaupun ada 2 indikator yang capaiannya sedikit di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, namun ada juga 2 indikator kinerja yang capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Jika dihitung secara rata-rata, maka capaian kinerja Badan Litban Perhubungan pada tahun 2015 mencapai 114,59%. Perkembangan capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan secara rinci dari tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**

**Target dan Realisasi Kinerja Badan Litbang Perhubungan**

**Tahun 2011 - 2015**

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENCAPAIAN | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| REN | REA | REN | REA | REN | REA | REN | REA | REN | REA |
| Jumlah penelitian yang diajukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan transportasi | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | 70.95 |
| Penelitian naskah akademis/kebijakan (NSPK) yang diajukan kepada Kemenhub | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 175,47 |
| Jumlah aplikasi, model, design/ prototipe | Laporan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 |
| Jumlah penelitian per peneliti | Laporan | N/A | N/A | 3 | 2 | 4 | 2.9 | 4 | 2 | 2 | 1.65 |
| Penelitian yang dikerjasamakan Litbang | Laporan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 |
| Penelitian yang dipublikasikan | Laporan | 153 | 182 | 158 | 112 | 163 | 137 | 173 | 156 | 120 | 120 |
| Penelitian yang mendapat HKI | Laporan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 |
| Database Transportasi | Laporan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 9 |

1. **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

Dalam kaitannya mewujudkan peningkatan kualitas penelitian hasil yang dicapai oleh Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2015 secara rata-rata untuk tiap-tiap indicator mencapai 154.93% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan dalam upaya meningkatkan akses ke sumber informasi IPTEK perhubungan rata-rata capaian untuk tiap-tiap indikatornya sebesar 179,8%, sedangkan dalam upaya meningkatkan informasi dan publikasi hasil litbangtek secara rata-rata untuk tahun 2015 capaian kinerjanya adalah sebesar 203.33%. Secara detil capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | | **REALISASI** | **KINERJA (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SATUAN** | **JUMLAH** |
| 1. | Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan | a. | Penelitian yang diajukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan transportasi | % | 70 | 70,95 | 101,35 |
| b. | Penelitian naskah akademis/kebijakan (NSPK) yang diajukan kepada Kemenhub | % | 80 | 100 | 125 |
|  |  |  |
|  | c. | Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | % | 75 | 175,47 | 232,5 |
|  | d. | Jumlah aplikasi, model, design/ prototipe | Laporan | 3 | 7 | 233.33 |
|  | e. | Jumlah penelitian per peneliti | Laporan | 2 | 1.65 | 82.5 |
| 2. | Peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK perhubungan | a. | Penelitian yang dikerjasamakan Litbang | Laporan | 4 | 7 | 175 |
| b. | Jumlah Penelitian yang dipublikasikan | Laporan | 65 | 120 | 184.6 |
| 3. | Peningkatan informasi dan publikasi hasil litbangtek | a. | Jumlah Penelitian mendapatkan HKI | Laporan | 15 | 16 | 106.67 |
|  | b. | Database Penelitian Transportasi | Jumlah | 3 | 9 | 300 |

1. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan**

Tidak tercapainya 2 indikator kinerja, yaitu jumlah penelitian per peneliti dan jumlah database penelitian transportasi antara lain disebabkan bahwa kegiatan penelitian di Badan Litbang Perhubungan saat ini dilaksanakan berdasarkan karena adanya permintaan dari daerah maupun penugasan dari Menteri Perhubungan. Kadangkala permintaan dari daerah maupun penugasan dari Menteri Perhubungan tidak mampu diakomodir melalui penelitian perorangan, melainkan harus melalui penelitian sedang atau besar. Sedangkan untuk indikator jumlah database penelitian transportasi hanya tercapai 9 jenis database dari 10 jenis database yang ditargetkan dapat tercapai di tahun 2015, hal ini disebabkan terdapat 1 jenis database yang masih dalam proses verifikasi.

Sedangkan 7 indikator kinerja lainnya capaiannya sesuai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja hal ini disebabkan antara lain bahwa kegiatan klinik transportasi yang mulai dicanangkan pada tahun 2014 mendapat respon yang cukup baik dari pemangku kepentingan di sektor transportasi (pemerintah daerah).

1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2015 adalah sebesar Rp. **228.259.100.000 (Dua ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam kegiatan tahun 2015 Secara lengkap rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4**

**Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET PK** | | **PAGU DIPA (RP)** | **REALISASI (RP)** | **KEUANGAN (%)** | **FISIK (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SATUAN** | **JML** |
| 1. | Peningkatan Kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan | a. | Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan | % | 70 | 62,512,955,712 | 53,393,074,262 | |  | | --- | | 85.41 | |  | | 101.35 |
| b. | Penelitian NSPK yang diajukan kepada kemenhub | % | 80 | 3,141,846,000 | |  | | --- | | 2,396,683,770 | | | 76.28 | 125 |
| c. | Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi | % | 75 | 18,285,579,480 | |  | | --- | | 14,063,767,533 | | | 76.91 | 232.5 |
| d. | Jumlah aplikasi, model, design/ prototype | Laporan | 5 | 6,963,450,000 | 5,634,359,982 | 80.91 | 100 |
| e. | Jumlah Penelitian per peneliti | Laporan | 2 | 351,851,834 | 229,605,884 | 77.63 | 82.5 |
| 2. | Peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK Transportasi | f. | Penelitian yang dikerjasamakan | Laporan | 4 | 9,288,721,000 | 8,336,407,613 | 89.75 | 100 |
|  |  | g. | Penelitian yang dipublikasikan | Laporan | 80 | 2,841,903,000 | 2,456,728,550 | 86.45 | 100 |
| 3. | Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan | h. | Penelitian yang mendapat HKI  ( Hak Kekayaan Intelektual ) | Laporan | 6 | 116,260,000 | |  | | --- | | 23,136,505 | | | 19.90 | 100 |
| i. | Database Penelitian Transportasi | Data | 2 | 6,529,555,000 | 5,799,745,945 | 88.82 | 90 |

1. **Realisasi Anggaran**

Pada tahun anggaran 2015 total anggaran Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar Rp. 228.259.100.000,-. Dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 33,736,691,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29,902,488,100,-belanja barang dialokasikan sebesar Rp. 171,922,777,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114,766,849,386,- dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 22,599,632,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 23,185,065,953,- Realisasi sampai akhir tahun 2015 mencapai Rp. 167.659.025.429,- (73,45%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rencana Anggaran Pagu Definitif** | **Rencana Anggaran Setelah Pemotongan** | **Realisasi Anggaran** | **Penyerapan Anggaran (%)** |
| 228,259,100,000 | 228,259,100,000 | 167,659,025,429 | 73.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Belanja** | **Pagu** | **Realisasi** | **Penyerapan Anggaran (%)** |
| Belanja Pegawai | 33,736,691,000 | 29,902,488,100 | 88.63 |
| Belanja Modal | 22,599,632,000 | 23,185,065,953 | 102.59 |
| Belanja Barang | 171,922,777,000 | 114,766,849,386 | 66.75 |

Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan anggaran yang diblokir baru dibuka menjelang akhir tahun, sehingga mengakibatkan tidak tersedia waktu yang cukup untuk melaksanakan beberapa kegiatan.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2015 mengacu pada visi dan misi Kementerian Perhubungan, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan kebijakan pembangunan perhubungan.

Untuk menjabarkan visi dan misi telah disusun rencana strategis yang berisi antara lain kebijakan pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sasaran, strategi yang ditempuh, program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2015 s.d 2019.

Dalam tahun anggaran 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan secara keseluruhan telah dapat melaksanakan sasaran tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan perhatian dan penyempurnaan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selama tahun 2015, tugas penelitian dan pengembangan khususnya di bidang transportasi serta pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan maka dilakukan penilaian terhadap penelitian yang dihasilkan dan disampaikan kepada Pimpinan Kementerian Perhubungan, unit eselon I maupun instansi lain yang terkait. Guna mewujudkan peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, pada tahun 2015 telah tercapai 70.95% hasil penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan, 100% kegiatan penelitian yang terkait Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK), kegiatan penelitian yang merupakan rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi sebesar 175%, penelitian yang merupakan jenis aplikasi/desain/model/prototype sebanyak 7 studi, dan masing-masing peneliti secara rata-rata mampu menghasilkan 1.65 penelitian.

1. Sasaran peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK transportasi.

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan akses ke sumber informasi IPTEK transportasi, pada tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan telah mengadakan 7 kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama, mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal atau pun warta penelitian sebanyak 120 penelitian, dan sebanyak 16 hasil penelitian telah mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Kementerian Hukum dan HAM.

1. Sasaran Peningkatan informasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan.

Pada sasaran ini terdapat 1 indikator kinerja, yaitu data base penelitian transportasi, pada tahun 2015 Badan Litbang Perhubungan telah menghasilkan 9 jenis database transportasi

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nome 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1134 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1999. Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2003. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2004. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**LAMPIRAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

**TAHUN 2014**